



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN/BASARNAS**

Tahun Sidang : 2023 – 2024
Masa Sidang : II
Rapat : Ke – 2
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Selasa, 7 November 2023
Sifat : Terbuka
Pukul : 10.15 WIB s.d 13.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara : 1. Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2023 s.d 31 Oktober 2023;
2. Membahas program/kegiatan Tahun Anggaran 2024;
3. Lain-lain.
Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si
Sekretaris : Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota : dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Menteri Perhubungan beserta jajaran

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.15 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan hari ini adalah Membahas Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2023 s.d 31 Oktober 2023, Membahas program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mempercepat realisasi program dan kegiatan TA 2023, dimana capaian per 6 November 2023, sebagai berikut:

Kementerian	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
Kementerian Perhubungan	68,63 %	73,18 %

2. Komisi V DPR RI dapat menyetujui Pergeseran Alokasi Anggaran TA 2024 pada Unit Organisasi Eselon I Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Dalam ribu rupiah

NO	KEMENTERIAN	PENYESUAIAN NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024 Tanggal 12 September 2023	ALOKASI ANGGARAN TA 2024 (SETELAH PERGESERAN) Tanggal 7 November 2023
Kementerian Perhubungan		38.604.826.459	38.604.826.459
1.	Sekretariat Jenderal	649.493.173	649.493.173
2.	Inspektorat Jenderal	112.424.822	112.424.822
3.	Ditjen Perhubungan Darat	6.664.310.961	6.664.310.350
4.	Ditjen Perhubungan Laut	9.538.475.833	9.550.026.444
5.	Ditjen Perhubungan Udara	7.709.626.236	7.709.626.373
6.	Ditjen Perkeretaapian	9.694.877.472	9.683.327.472
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3.708.986.611	3.708.986.474
8.	Badan Kebijakan Transportasi	196.457.340	196.457.340
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	330.174.011	330.174.011

3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk:
 - a. meningkatkan sistem monitoring dan koordinasi dalam mempercepat realisasi program dan anggaran TA 2023 di masing-masing Unit Organisasi Eselon I.
 - b. memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di semua subsektor perhubungan.

c. meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap program *Buy The Service* (BTS), layanan Terminal Umum serta Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).

d. menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 7 November 2023

MENTERI PERHUBUNGAN,



BUDI KARYA SUMADI

KETUA RAPAT,



LASARUS